

## **Dinamika Ketimpangan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024**

### ***Dynamics of Economic Inequality in Provinces on Sumatra Island 2020-2024***

**Muhammad Rizky Hidayat<sup>1\*</sup>, Maulidyah Indira Hasmarini<sup>2</sup>**  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
risky.yatntt@gmail.com; mi148@ums.ac.id

#### **Abstract**

*This research effort conducts a comprehensive analysis of the determinants affecting income inequality in Provinces in Sumatra Island during the period 2020 to 2024, using the Ordinary Least Squares (OLS) methodology. The variables examined include Gross Regional Domestic Product (GRDP), number of educational institutions, domestic capital investment and the level of the consumer price index. The findings show that domestic investment and GRDP have a positive and statistically significant impact on income inequality, indicating that financial investment is concentrated in certain regions exacerbating economic disparities. In contrast, the consumer price index shows a substantive negative effect on inequality, implying that an increase in the consumer price index can contribute to reducing disparities through a redistributive mechanism that benefits low-income demographics. Meanwhile, the number of educational institutions does not show a significant effect on income inequality. The analytical model explains 42.61% of the variance in income inequality in 8 Provinces in Sumatra Island. These findings underscore the critical need to equalize the distribution of investment, improve the quality of education, and maintain a stable level of the consumer price index to encourage more inclusive economic growth.*

**Keywords:** *Consumer Price Index; Investment; Inequality; Gross Regional Domestic Product*

#### **Abstrak**

Upaya penelitian ini melakukan analisis komprehensif tentang determinan yang mempengaruhi ketidaksetaraan pendapatan Provinsi - Provinsi di Pulau Sumatera selama jangka waktu 2020 hingga 2024, menggunakan metodologi *Ordinary Least Squares* (OLS). Variabel yang diperiksa meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah lembaga pendidikan, investasi modal domestik dan tingkat indeks harga konsumen. Temuan menunjukkan bahwa investasi domestik dan PDRB memberikan dampak positif dan signifikan secara statistik pada ketidaksetaraan pendapatan, menunjukkan bahwa investasi keuangan terkonsentrasi di wilayah tertentu memperburuk kesenjangan ekonomi. Sebaliknya, indeks harga konsumen menunjukkan efek negatif yang substantif pada ketidaksetaraan, menyiratkan bahwa peningkatan indeks harga konsumen dapat berkontribusi untuk mengurangi disparitas melalui mekanisme redistributif yang menguntungkan demografi berpenghasilan rendah. Sementara itu, jumlah lembaga pendidikan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketidaksetaraan pendapatan. Model analitik menjelaskan 42,61% varians ketidaksetaraan pendapatan 8 Provinsi Pulau Sumatera. Temuan ini menggarisbawahi kebutuhan kritis untuk menyamakan distribusi investasi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempertahankan tingkat indeks harga konsumen yang stabil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

**Kata Kunci:** Indeks Harga Konsumen; Investasi; Ketimpangan; Produk Domestik Regional Bruto

### **1. Pendahuluan**

Negara-negara dengan sistem ekonomi terbuka tidak dapat menghindari pengaruh perdagangan internasional. Perdagangan tersebut penting untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi secara domestik, mendapatkan

manfaat dari spesialisasi, memperluas pasar, dan meningkatkan keuntungan. Perdagangan internasional merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara-negara berkembang di kawasan ASEAN. Menurut Putri & Siladjaja (2021), perdagangan internasional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana negara berkembang lebih banyak melakukan ekspor daripada impor maka pendapatan nasional negara tersebut akan naik. Perdagangan ekspor saat ini dipengaruhi oleh globalisasi pasar yang mengacu pada setiap negara yang mengharuskan negara berhubungan dengan negara lain di sektor ekonomi (Arifin, 2022).

Disparitas pendapatan merupakan isu sentral dalam dinamika pembangunan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan tingkat heterogenitas geografis dan sosial-ekonomi yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata antarwilayah (Chang & Fang, 2023). Ketimpangan ini tercermin dari perbedaan tingkat kesejahteraan antar provinsi, bahkan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi. Salah satu contoh nyata adalah Provinsi di Pulau Sumatera, yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat ekonomi regional. Meski pertumbuhan ekonomi provinsi ini menunjukkan tren positif selama periode 2018–2023, realitas sosial-ekonominya menunjukkan bahwa tidak semua wilayah menikmati pertumbuhan secara merata. Beberapa kabupaten/kota tetap tertinggal dalam aspek pendapatan dan pembangunan, memperkuat disparitas yang ada dan menunjukkan lemahnya pemerataan hasil pembangunan.

Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari data Indeks Gini yang relatif tinggi dan disparitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antar kabupaten/kota yang cukup mencolok (Matharu et al., 2020). Kabupaten atau kota yang memiliki infrastruktur lebih maju dan akses ekonomi yang lebih baik cenderung menikmati pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang lebih terisolasi atau minim investasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum cukup inklusif dan masih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu. Ketimpangan yang berkelanjutan dapat menghambat upaya pembangunan jangka panjang, mengurangi efektivitas kebijakan fiskal dan sosial, serta memperbesar potensi konflik sosial akibat ketidaksetaraan. Oleh karena itu, studi ini penting untuk mengevaluasi determinan utama yang memengaruhi disparitas pendapatan di Provinsi di Pulau Sumatera, guna merumuskan strategi kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Untuk memahami ketimpangan pendapatan yang terjadi, penelitian ini mengadopsi teori Growth and Inequality yang dikemukakan oleh Kuznets (2019). Teori ini menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat karena manfaat pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok atau wilayah yang sudah memiliki akses terhadap sumber daya, teknologi, dan infrastruktur yang lebih baik. Wilayah perkotaan atau sektor modern sering kali menjadi pusat akumulasi manfaat tersebut, sementara daerah tertinggal justru mengalami stagnasi. Namun, seiring berjalannya waktu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diharapkan menjadi lebih inklusif, ditandai dengan distribusi pendapatan yang lebih merata dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam fase ini, investasi di sektor pendidikan, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan akses terhadap peluang ekonomi akan berperan penting dalam menurunkan tingkat ketimpangan (Piao & Managi, 2023).

Teori ini menjadi kerangka konseptual utama dalam menganalisis pola ketimpangan di Provinsi di Pulau Sumatera.

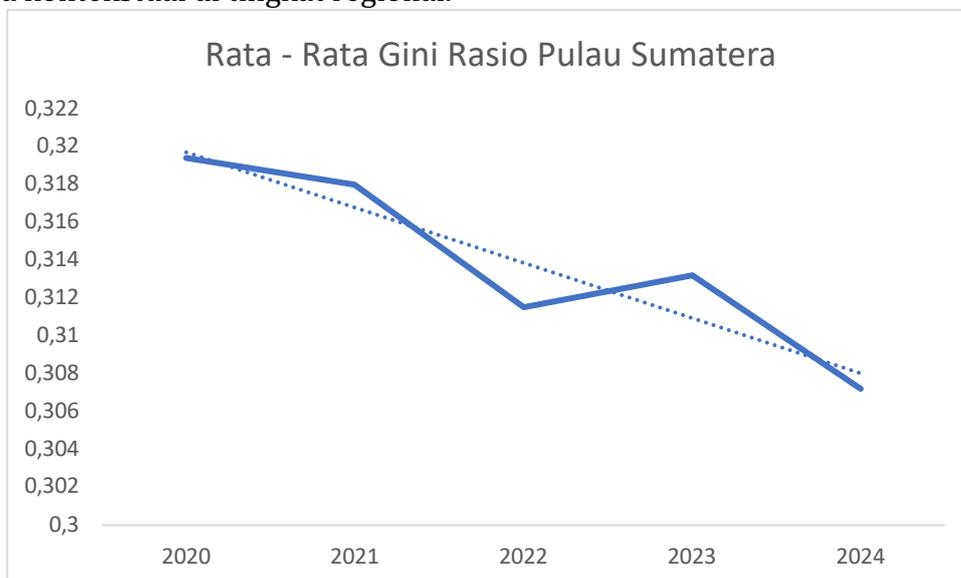
Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji isu ketimpangan pendapatan di Indonesia dari beragam sudut pandang dan pendekatan. Salah satunya adalah studi oleh Sri Hartati (2022) yang menekankan peran redistribusi fiskal dari pemerintah pusat ke daerah sebagai salah satu faktor dominan yang memicu ketimpangan regional. Ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran pembangunan menyebabkan daerah-daerah tertentu, terutama yang memiliki akses politik dan ekonomi lebih baik, cenderung memperoleh porsi anggaran yang lebih besar dibanding daerah tertinggal. Ketimpangan dalam distribusi fiskal ini berimplikasi langsung pada kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik dan infrastruktur ekonomi yang mendorong pertumbuhan. Ketika sebagian besar dana pembangunan terfokus di wilayah perkotaan atau kawasan strategis, maka peluang pertumbuhan di daerah pinggiran akan semakin terbatas. Kondisi ini menjadi akar dari kesenjangan struktural yang memperkuat disparitas pendapatan antar daerah di Indonesia, termasuk Provinsi di Pulau Sumatera.

Dalam konteks Provinsi di Pulau Sumatera, Nainggolan (2020) mencatat bahwa meskipun PDRB provinsi ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota masih tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum disertai dengan pemerataan pembangunan secara geografis. Beberapa kabupaten dengan akses terhadap pusat ekonomi dan infrastruktur utama menunjukkan perkembangan yang signifikan, sementara wilayah-wilayah di pinggiran cenderung tertinggal. Temuan ini diperkuat oleh Pilgrimiené et al. (2020), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata akan menghambat pencapaian kesejahteraan yang inklusif. Ketika pertumbuhan hanya terkonsentrasi di pusat-pusat tertentu, maka masyarakat di luar wilayah tersebut akan kesulitan untuk mengakses peluang ekonomi yang setara. Akibatnya, kesenjangan pendapatan antarwilayah pun semakin melebar dari waktu ke waktu.

Meski demikian, terdapat studi yang menyarankan bahwa peningkatan output agregat dapat menjadi solusi untuk memperkecil kesenjangan. Osuntuyi & Lean (2022) menyimpulkan bahwa ekspansi ekonomi melalui peningkatan produksi barang dan jasa secara keseluruhan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, sehingga mempersempit ketimpangan pendapatan. Namun demikian, kajian yang secara eksplisit mengevaluasi peran faktor-faktor seperti akses pendidikan, pemerataan infrastruktur, dan distribusi investasi terhadap disparitas pendapatan di Sumatera Utara masih sangat terbatas. Minimnya literatur yang membahas secara khusus konteks lokal provinsi ini menandakan adanya research gap yang signifikan. Maka dari itu, penting untuk mengembangkan studi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga menelaah faktor-faktor mikro dan sektoral yang memengaruhi ketimpangan pendapatan antarwilayah secara lebih menyeluruh dan kontekstual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi disparitas pendapatan antar wilayah di 8 Provinsi Pulau Sumatera, dengan menitikberatkan pada peran pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan distribusi investasi. Pemilihan Pulau Sumatera sebagai lokasi penelitian didasarkan pada posisinya yang strategis sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Pulau Sumatera, namun tetap menghadapi tantangan ketimpangan pendapatan yang cukup signifikan

antar kabupaten/kota. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya perbedaan akses dan kualitas pembangunan yang belum merata di seluruh wilayah provinsi. Untuk menjawab tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS), yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel independen dan tingkat ketimpangan pendapatan. Analisis ini dilengkapi dengan data kualitatif guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hasil statistik dan untuk memperkuat interpretasi temuan secara kontekstual di tingkat regional.



Grafik 1. Rata Rata Gini Rasio Pulau Sumatera (2020-2024)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan Grafik 1 rata rata gini rasio Pulau Sumatera dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren penurunan ketimpangan pendapatan secara bertahap. Pada tahun 2020, nilai Gini Rasio berada di atas 0,32 dan menurun secara konsisten hingga mencapai kisaran 0,308 pada tahun 2024. Meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2023, tren umum menunjukkan arah yang positif menuju distribusi pendapatan yang lebih merata. Garis tren mengindikasikan penurunan yang stabil dari waktu ke waktu. Penurunan ini mengisyaratkan adanya perbaikan dalam pemerataan ekonomi, yang kemungkinan didorong oleh peningkatan akses pendidikan, pemerataan investasi, dan perbaikan daya beli masyarakat. Dengan menyoroti faktor pendapatan, pendidikan, investasi, dan daya beli dalam konteks ketimpangan pendapatan di 8 Provinsi Pulau Sumatera, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur yang selama ini masih terbatas dalam membahas secara komprehensif pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap disparitas antar wilayah.

Dengan menyoroti faktor pendapatan, pendidikan, investasi dan daya beli dalam konteks ketimpangan pendapatan di Provinsi di Pulau Sumatera, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur yang selama ini masih terbatas dalam membahas secara komprehensif pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap disparitas antar wilayah. Pendekatan yang digunakan diharapkan mampu mengungkap hubungan kausal yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan. Mengingat pentingnya peran Sumatera dalam struktur perekonomian nasional, hasil penelitian ini juga memiliki relevansi lebih luas bagi daerah lain yang menghadapi masalah

serupa. Kontribusi strategis dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan desentralisasi pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat memperkuat arah kebijakan pembangunan nasional yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan keseimbangan regional.

## 2. Metode

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan disparitas pendapatan di 8 Provinsi Pulau Sumatera dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan yang diterapkan. Fokus kajian meliputi akses pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan distribusi investasi. Pemilihan 8 Provinsi Pulau Sumatera sebagai objek studi didasarkan pada posisinya sebagai gerbang ekonomi Sumatra dengan dinamika pembangunan yang kompleks. Provinsi yang dipilih adalah Aceh, Bengkulu, Jambi, Kep. Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pemilihan periode adalah mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Metode yang digunakan adalah Ordinary least Square (OLS) yang mengombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memperkuat validitas temuan Sugiyono (2018). Pendekatan ini memungkinkan penggalan data dari berbagai sumber, seperti statistik Indeks Gini, PDRB riil per kapita, dan laporan infrastruktur, yang dikomplementasikan dengan wawancara mendalam dan studi dokumen kebijakan lokal. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di 8 Provinsi Pulau Sumatera.

Model penelitian ini adalah:

$$GINI_{it} = \alpha + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 SKLH_{it} + \beta_3 INV_{it} + \beta_4 IHK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Variabel utama dalam penelitian ini yang pertama adalah disparitas pendapatan dalam model diwakili oleh  $GINI_t$ , yang bertindak sebagai variabel terikat. Kemudian variabel  $\log PDRB_t$ ,  $\log SKLH_t$ ,  $\log INV_t$  dan  $INF_t$  bertindak sebagai variabel independen dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi, Jumlah Sekolah, Investasi Dalam Negeri dan indeks harga konsumen di 8 Provinsi Pulau Sumatera. Untuk menjelaskan lebih lengkap akan dirangkum pada tabel 1.

**Tabel 1. Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Keterangan	Satuan
<i>GINI</i>	Disparitas pendapatan Provinsi di 8 Provinsi Pulau Sumatera	Indeks
<i>PDRB</i>	Produk domestik bruto Provinsi di 8 Provinsi Pulau Sumatera	Milyar Rupiah
<i>SKLH</i>	Jumlah sekolah di Provinsi di 8 Provinsi Pulau Sumatera	Unit
<i>INV</i>	Investasi dalam negeri di Provinsi di 8 Provinsi Pulau Sumatera	Miliar Rupiah
<i>IHK</i>	Indeks harga konsumen di Provinsi di 8 Provinsi Pulau Sumatera	Satuan

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

### Hipotesis

- H1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap disparitas pendapatan
- H2. Jumlah sekolah berpengaruh signifikan negatif terhadap disparitas pendapatan
- H3. Investasi dalam negeri berpengaruh signifikan negatif terhadap disparitas pendapatan
- H4. Indeks Harga Konsumen berpengaruh signifikan positif terhadap disparitas pendapatan

### Teknik Estimasi

Keputusan untuk menggunakan regresi linier dalam konteks upaya penelitian ini terutama berasal dari kapasitas yang melekat untuk menyediakan cara yang mudah dan transparan untuk menilai interaksi yang ada antara variabel independen dan variabel dependen dalam kumpulan data tertentu. Teknik analitik khusus ini tidak hanya memfasilitasi penyelidikan hubungan linier jangka pendek dan jangka panjang antara variabel tetapi juga memungkinkan pemeriksaan simultan dari beberapa variabel independen dalam kaitannya dengan efeknya pada variabel dependen yang diteliti (Gujarati, 2009). Sebelum terlibat dalam estimasi model melalui penerapan metodologi *Ordinary Least Squares* (OLS), sangat penting untuk mengevaluasi serangkaian asumsi klasik—yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi—untuk memastikan keandalan dan validitas keseluruhan dari model yang dihasilkan. Kesimpulannya, regresi linier telah terbukti menjadi instrumen analitis yang sangat kuat yang secara efektif membantu dalam membedakan dan menjelaskan hubungan rumit di antara berbagai variabel yang terlibat dalam penelitian ini, sambil mengandalkan kepatuhan ketat terhadap asumsi klasik yang diperlukan yang mendukung integritas pendekatan statistik ini. Penilaian komprehensif dari asumsi-asumsi ini sangat penting, karena setiap pelanggaran berpotensi membahayakan validitas temuan dan menyebabkan interpretasi data yang salah. Dengan demikian, penerapan regresi linier yang cermat tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang dinamika yang berperan tetapi juga berkontribusi secara signifikan pada bidang analisis kuantitatif yang lebih luas dalam ilmu sosial dan disiplin ilmu terkait.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Estimasi dalam model regresi data panel dilakukan menggunakan tiga metode, yaitu Common Effects Model (CEM), Fixed Effects Model (FEM), dan Random Effects Model (REM).. Hasil estimasi data panel ekspor ditampilkan pada

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak Produk Domestik Daerah Bruto (PDRB), kuantitas lembaga pendidikan, investasi modal domestik dan tingkat indeks harga konsumen terhadap disparitas pendapatan di 8 Provinsi Pulau Sumatera selama rentang waktu 2020-2024. Menggunakan metodologi *Ordinary Least Squares* (OLS), Tabel 2 menyajikan sintesis temuan estimasi OLS di samping verifikasi asumsi yang mendasarinya, mencakup validitas model dan signifikansi statistik.

**Tabel 2**  
**Hasil Estimasi OLS**

$GINI_{it} = 0,5390 - 0,0170\log PDRB_{it} + 0,0135\log SKLH_{it} + 0,0085\log INV_{it} - 0,0015IHK_{it}$			
(0,000)**	(0,060)	(0,001)**	(0,005)**

---

$R^2 = 0,4261$ ;  $F\text{-Stat}(4,35) = 6,50$ ;  $\text{Sig. } F\text{-Stat} = 0,0005$

---

**Uji Diagnosis**

**Multikolinieritas (VIF)**

$\log PDRB = 2,31$ ;  $\log SKLH = 2,22$ ;  $\log INV = 1,07$ ; *Indeks harga konsumen* = 1,00

**Normalitas (Uji Jarque-Bera)**

$\chi^2(2) = 3,6571$  *Sig.*  $\chi^2(2) = 0,1606$

**Heteroskedastisitas (White No Cross Term)**

$\chi^2(14) = 20,96$  *Sig.*  $\chi^2(14) = 0,1027$

**Linieritas (Ramsey Reset)**

$F\text{stat}(3,32) = 1,38$  *Prob.F(3,32) = 0,2676*

---

*Keterangan: \*\*Signifikan pada  $\alpha = 0,05$*

*Sumber: Pengolahan Stata MP17*

Hasil tes statistik menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini menganut beberapa asumsi kritis. Tes *Jarque-Bera* (JB) menghasilkan probabilitas 0,1606, melebihi tingkat signifikansi  $\alpha$  0,05, yang menunjukkan bahwa residu mengikuti distribusi normal, sehingga memenuhi kriteria normalitas residual. Selain itu, *Uji White No Cross Term*, dengan probabilitas  $\chi^2$  0,1027 (yang di atas 0,05), menegaskan bahwa residu model menunjukkan homoskedastisitas, menunjukkan varians konstan dan meniadakan masalah heteroskedastisitas. Selain itu, tidak ada variabel independen yang memiliki Faktor Indeks harga konsumen Varians (VIF) melebihi 10, sehingga menghilangkan kekhawatiran mengenai potensi multikolinieritas. Disisi lain uji *Linieritas Ramsey Reset* menunjukkan *Sig.F* 0,2676 yang lebih besar dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa model memiliki spesifikasi yang sesuai.

Temuan dari *F Test* mengungkapkan bahwa probabilitas yang terkait dengan statistik *F* adalah 0,005, yang kurang dari tingkat signifikansi  $\alpha$  0,05. Hal ini menunjukkan bahwa, secara agregat, variabel independen termasuk Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Sekolah, Investasi Dalam Negeri, dan Indeks Harga Konsumen memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap ketidaksetaraan pendapatan di 8 Provinsi Pulau Sumatera. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,4261 menunjukkan bahwa 42,61% dari varians ketidaksetaraan pendapatan di Pulau Jawa dapat dijelaskan oleh fluktuasi variabel tersebut, sedangkan sisanya 57,29% disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak tercakup oleh model ini. Menurut Tabel 2, koefisien yang signifikan secara statistik meliputi  $\beta_1$ ,  $\beta_3$  dan  $\beta_4$ , yang menunjukkan bahwa variabel independen dengan dampak substansial terhadap ketidaksetaraan pendapatan di 8 Provinsi Pulau Sumatera adalah PDRB, investasi domestik dan indeks harga konsumen. Sebaliknya, jumlah lembaga pendidikan tidak menunjukkan signifikansi.

Berdasarkan hasil pada tabel 2 menunjukkan PDRB signifikan memengaruhi ketimpangan di 8 Provinsi Pulau Sumatera. Setiap kenaikan 1% PDRB akan menurunkan ketimpangan di 8 Provinsi Pulau Sumatera sebesar 0,0170 poin. Kemudian Investasi Dalam Negeri juga menunjukkan signifikansi terhadap ketimpangan di 8 Provinsi Pulau Sumatera. Setiap kenaikan 1% Investasi Dalam Negeri akan meningkatkan ketimpangan di 8 Provinsi Pulau Sumatera sebesar 0,0085 poin. Selanjutnya, Indeks Harga Konsumen menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan di 8 Provinsi Pulau Sumatera. Setiap kenaikan 1 poin Indeks Harga Konsumen akan menurunkan ketimpangan di 8 Provinsi Pulau Sumatera sebesar 0,0015 poin.

### **PDRB terhadap Ketimpangan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketidaksetaraan pendapatan di Provinsi di 8 Provinsi Pulau Sumatera. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis Kuznets (2019), yang menyatakan bahwa selama fase awal pembangunan ekonomi, peningkatan PDRB biasanya memperburuk kesenjangan pendapatan sebelum pengurangan selanjutnya pada tahap perkembangan selanjutnya. Namun demikian, dalam konteks spesifik Provinsi di Pulau Sumatera, kurangnya signifikansi PDRB mengenai disparitas pendapatan dapat dijelaskan melalui berbagai determinan struktural. Salah satu penentu tersebut adalah distribusi kemajuan ekonomi yang tidak proporsional di seluruh provinsi, di mana pertumbuhan yang kuat di daerah tertentu tidak selalu menyiratkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jika keuntungan pertumbuhan terbatas pada kelompok tertentu, seperti pemilik modal atau sektor bisnis yang ekspansif, maka ketidaksetaraan pendapatan dapat bertahan pada tingkat yang lebih tinggi meskipun ada peningkatan PDRB (Hamid et al., 2021). Selain itu, dominasi sektor ekonomi tertentu juga dapat bertindak sebagai penghalang bagi pemerataan pendapatan. Jika pertumbuhan terutama didorong oleh sektor-sektor padat modal, seperti industri ekstraktif dan pertanian skala besar, dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja relatif terbatas, menghasilkan manfaat minimal bagi populasi berpenghasilan rendah.

Keterbatasan daya serap tenaga kerja menjadi faktor lain yang menjelaskan hubungan yang tidak signifikan antara PDRB dan ketimpangan pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup bagi kelompok berpendapatan rendah, maka dampaknya terhadap kesenjangan ekonomi menjadi terbatas (Salsabila & Azhar, 2023). Dalam banyak kasus, efek trickle-down dari pertumbuhan ekonomi juga tidak berjalan secara optimal, sehingga manfaatnya tetap terkonsentrasi pada kelompok ekonomi atas. Ketimpangan yang persisten ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB tidak serta-merta mengarah pada pengurangan disparitas pendapatan tanpa adanya kebijakan yang mendorong inklusivitas ekonomi. Oleh karena itu, meskipun teori Kuznets menunjukkan adanya hubungan antara PDRB dan ketimpangan dalam jangka panjang, dalam konteks Provinsi di Pulau Sumatera, pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih belum cukup merata dan inklusif untuk secara efektif mengurangi kesenjangan pendapatan (Herlina et al., 2022). Kebijakan yang lebih berorientasi pada pemerataan, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, pembangunan infrastruktur yang merata, serta insentif bagi usaha kecil dan menengah, menjadi langkah strategis yang dapat meningkatkan dampak positif pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan ketimpangan di wilayah ini.

### **Jumlah Sekolah terhadap Ketimpangan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaruh lembaga pendidikan tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap ketidaksetaraan pendapatan, meskipun menunjukkan tren negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah sekolah tidak memadai untuk melakukan perbaikan langsung kesenjangan pendapatan di 8 Provinsi Pulau Sumatera. Faktor utama yang menjelaskan fenomena ini adalah kualitas pendidikan yang berbeda di berbagai

daerah. Lembaga yang terletak di lingkungan perkotaan biasanya memiliki fasilitas yang unggul, tenaga pengajar yang lebih berkualitas, dan akses ke teknologi pendidikan canggih dibandingkan dengan rekan-rekan pedesaan mereka (Saputra & Setyowati, 2024). Selain itu, akses ke pendidikan tinggi tetap menjadi tantangan berat, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi. Sementara pendidikan dasar dan menengah telah menjadi lebih mudah diakses, ketidaksetaraan tetap ada jika individu dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah menghadapi hambatan dalam mengejar peluang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan tidak adanya pendidikan tinggi, mobilitas sosial sangat terkendala, membuatnya sulit untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dalam waktu dekat (Herbigovina & Setyowati, 2023).

Selain faktor aksesibilitas, ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri juga menjadi kendala dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Peningkatan jumlah sekolah tidak serta-merta meningkatkan kesempatan kerja jika kurikulum yang diterapkan belum mampu menghasilkan lulusan dengan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja. Banyak lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan layak karena mismatch keterampilan, sehingga manfaat pendidikan tidak secara optimal menekan kesenjangan ekonomi (Finuliyah & Khusaini, 2022). Selain itu, efek pendidikan terhadap distribusi pendapatan umumnya baru terlihat dalam jangka panjang, sedangkan penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 2018–2023. Hasil ini sejalan dengan penelitian Carissa & Khoirudin (2020), yang menyatakan bahwa meskipun pendidikan merupakan instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan sangat tergantung pada aksesibilitas dan kualitasnya. Oleh karena itu, kebijakan yang hanya berfokus pada kuantitas sekolah tanpa memperhatikan peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan belum cukup untuk mengatasi kesenjangan pendapatan secara efektif (Azim & Sutjipto, 2022).

### **Investasi terhadap Ketimpangan**

Investasi dalam negeri memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 8 Provinsi Pulau Sumatera, yang berarti bahwa peningkatan investasi justru memperlebar disparitas ekonomi. Temuan ini sejalan dengan studi (Erokhin et al., 2020), yang menunjukkan bahwa investasi yang terkonsentrasi di wilayah tertentu dapat meningkatkan ketimpangan karena manfaat ekonomi yang tidak tersebar merata. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kecenderungan investasi yang masuk ke daerah yang sudah memiliki infrastruktur memadai dan tenaga kerja terampil. Daerah-daerah yang telah maju secara ekonomi lebih menarik bagi investor karena menawarkan efisiensi yang lebih tinggi, sementara daerah tertinggal sering kali kurang mendapatkan manfaat dari arus investasi. Selain itu, jenis investasi yang lebih banyak masuk ke sektor kapital-intensif, seperti pertambangan dan industri besar, cenderung tidak memberikan dampak pemerataan pendapatan yang signifikan (Geddafa et al., 2023). Sektor-sektor ini lebih mengandalkan teknologi dan modal besar dibandingkan tenaga kerja lokal, sehingga hanya segelintir kelompok ekonomi yang mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut.

Selain faktor konsentrasi investasi dan sifat kapital-intensifnya, kurangnya dampak investasi terhadap tenaga kerja lokal juga turut memperlebar kesenjangan.

Jika investasi lebih banyak berbasis teknologi tinggi dan tidak menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, maka manfaat ekonominya tidak dirasakan secara luas. Dampak lain yang perlu diperhatikan adalah efek domino dari investasi terhadap harga properti dan biaya hidup di daerah yang menerima investasi besar. Peningkatan investasi dapat mendorong kenaikan harga tanah, sewa properti, dan biaya hidup secara keseluruhan, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan bagi kelompok berpenghasilan rendah (Polloni-Silva et al., 2021). Oleh karena itu, kebijakan yang memastikan investasi didistribusikan secara lebih merata dan diarahkan pada sektor-sektor yang lebih banyak menyerap tenaga kerja lokal menjadi sangat penting dalam mengurangi disparitas pendapatan. Pemerintah dapat mendorong investasi yang lebih inklusif dengan memberikan insentif bagi sektor padat karya, memperbaiki akses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, serta meningkatkan infrastruktur di daerah yang kurang berkembang untuk menarik lebih banyak investasi yang berorientasi pada pemerataan ekonomi (Mutai et al., 2024).

### **Indeks Harga Konsumen terhadap Ketimpangan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks harga konsumen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti bahwa peningkatan indeks harga konsumen cenderung menurunkan disparitas pendapatan. Temuan ini mengindikasikan adanya efek redistributif dari indeks harga konsumen, yang dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme ekonomi (Basnet et al., 2022). Salah satu faktor utama adalah kenaikan upah nominal di sektor informal, yang sering kali lebih responsif terhadap indeks harga konsumen dibandingkan sektor formal ekonomi (Permatasari et al., 2017). Sektor informal yang banyak diisi oleh kelompok berpendapatan rendah biasanya mengalami peningkatan pendapatan lebih cepat dalam kondisi indeks harga konsumen, sehingga kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dapat menyempit. Selain itu, indeks harga konsumen juga dapat mendorong redistribusi daya beli (Sumaryoto et al., 2021). Dalam kondisi indeks harga konsumen moderat, kelompok miskin yang bergantung pada upah harian atau bantuan sosial sering kali mengalami peningkatan daya beli lebih cepat dibandingkan kelompok kaya yang memiliki aset dalam bentuk instrumen finansial yang nilainya tergerus akibat indeks harga konsumen. Dengan demikian, indeks harga konsumen dalam batas tertentu dapat membantu mempersempit ketimpangan ekonomi melalui mekanisme penyesuaian upah dan daya beli.

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam merespons indeks harga konsumen turut memainkan peran penting dalam dampak indeks harga konsumen terhadap ketimpangan pendapatan. Pemerintah sering kali mengeluarkan kebijakan kompensasi, seperti subsidi pangan, bantuan langsung tunai, atau program perlindungan sosial lainnya untuk mengurangi dampak indeks harga konsumen terhadap kelompok miskin. Bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah dan mempersempit kesenjangan ekonomi (Jacobson & Harrison, 2022). Di sisi lain, indeks harga konsumen juga dapat berdampak pada sektor korporasi dan kelompok kaya yang memiliki aset finansial dalam bentuk obligasi atau simpanan berbunga tetap, yang nilainya dapat tergerus akibat kenaikan harga secara umum. Hal ini menyebabkan penurunan nilai riil kekayaan mereka, yang secara relatif dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, efek indeks harga konsumen terhadap ketimpangan sangat bergantung pada tingkat indeks harga konsumen itu sendiri. Jika indeks harga konsumen terlalu tinggi dan tidak diimbangi

dengan kebijakan yang mendukung pendapatan kelompok miskin, maka dampaknya justru dapat memperburuk ketimpangan (Kurniawan et al., 2023). Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi indeks harga konsumen harus mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan dampak sosial-ekonominya agar indeks harga konsumen tetap terkendali tanpa menimbulkan ketimpangan baru.

#### 4. Simpulan

Penelitian ini menyelidiki faktor-faktor penentu yang mempengaruhi ketidaksetaraan pendapatan di Provinsi di 8 Provinsi Pulau Sumatera dari tahun 2020 hingga 2024 dengan menggunakan metodologi *Ordinary Least Squares* (OLS). Temuan menunjukkan bahwa investasi domestik memberikan dampak positif yang substantif pada ketidaksetaraan, menunjukkan bahwa konsentrasi investasi di daerah-daerah tertentu memperburuk kesenjangan ekonomi. Sebaliknya, indeks harga konsumen menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap ketidaksetaraan, yang dapat mengurangi disparitas melalui mekanisme *redistributif* yang menguntungkan populasi berpenghasilan rendah. Selain itu, ketersediaan lembaga pendidikan tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap ketidaksetaraan, menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih manjur untuk mempromosikan kesetaraan pendidikan dan kemajuan ekonomi. Model ini menyumbang 42,61% dari varians ketidaksetaraan pendapatan di 8 Provinsi Pulau Sumatera. Hasilnya menyoroti keharusan untuk alokasi investasi yang lebih adil, peningkatan kualitas pendidikan, dan manajemen indeks harga konsumen yang bijaksana untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih adil dan lebih adil.

#### 5. Daftar Pustaka

- Anin Nabail Azim, & Hady Sutjipto. (2022). Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2, 1–16.
- Basnet, H. C., Donou-Adonsou, F., & Upadhyaya, K. (2022). Remittances-Inflation Nexus In South Asia: An Empirical Examination. *Journal Of Financial Economic Policy*, 14(2), 152–161.
- Carissa, N., & Khoirudin, R. (2020). The Factors Affecting The Rupiah Exchange Rate In Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 37–46. <https://doi.org/10.29259/Jep.V18i1.9826>
- Chang, C. L., & Fang, M. (2023). Impact Of A Sharing Economy And Green Energy On Achieving Sustainable Economic Development: Evidence From A Novel NARDL Model. *Journal Of Innovation And Knowledge*, 8(1). <https://doi.org/10.1016/J.Jik.2022.100297>
- Erokhin, V., Diao, L., & Du, P. (2020). Sustainability-Related Implications Of Competitive Advantages In Agricultural Value Chains: Evidence From Central Asia—China Trade And Investment. *Sustainability*, 12(3), 1117.
- Finuliyah, F., & Khusaini, M. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Belanja Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Wilayah. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 1(1), 18–28. <https://doi.org/10.21776/Jdess.2022.01.1.3>

- Geddafa, T., Melka, Y., & Sime, G. (2023). Cost-Benefit Analysis And Financial Viability Of Household Biogas Plant Investment In South Ethiopia. *Sustainable Energy Research*, 10(1), 20.
- Gujarati, D. N. (2009). Basic Econometrics.
- Hamid, I., Alam, M. S., Murshed, M., Jena, P. K., Sha, N., & Alam, M. N. (2021). The Roles Of Foreign Direct Investments, Economic Growth, And Capital Investments In Decarbonizing The Economy Of Oman. *Environmental Science And Pollution Research*, 1–17.
- Herlina, D. N., Adhitya, B., Winarto, H., Kencana, H., & Prabawa, A. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektoral Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Majalah Imiah Manajemen Dan Bisnis*, 19(1), 25–34.
- Jacobson, J., & Harrison, B. (2022). Sustainable Fashion Social Media Influencers And Content Creation Calibration. *International Journal Of Advertising*, 41(1), 150–177.
- Kurniawan, Maulana, A., & Iskandar Y. (2023). The Effect Of Technology Adaptation And Government Financial Support On Sustainable Performance Of Msmes During The COVID-19 Pandemic. *Cogent Business & Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2177400>
- Kuznets, S. (2019). Economic Growth And Income Inequality. In *The Gap Between Rich And Poor* (Pp. 25–37). *Routledge*.
- Matharu, M., Jain, R., & Kamboj, S. (2020). Understanding The Impact Of Lifestyle On Sustainable Consumption Behavior: A Sharing Economy Perspective. *Management Of Environmental Quality: An International Journal*, 32(1), 20–40.
- Mutai, N. C., Ibeh, L., Nguyen, M. C., Kiarie, J. W., & Ikamari, C. (2024). Sustainable Economic Development In Kenya: Influence Of Diaspora Remittances, Foreign Direct Investment And Imports. *African Journal Of Economic And Management Studies*.
- Nainggolan, E. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *Penelitian Ilmu Manajemen*, 6(2), 89–99.
- Osuntuyi, B. V., & Lean, H. H. (2022). Economic Growth, Energy Consumption And Environmental Degradation Nexus In Heterogeneous Countries: Does Education Matter? *Environmental Sciences Europe*, 34(1). <https://doi.org/10.1186/s12302-022-00624-0>
- Permatasari, A., Rahmita, P. :, Ningsih, B., & Rosyetti, D. (2017). Effect Of Domestic Investment And Inflation On The Money Supply In A Broad Sense In Indonesia Period. *JOM Fekon*, 4(1).
- Piao, X., & Managi, S. (2023). The International Role Of Education In Sustainable Lifestyles And Economic Development. *Scientific Reports*, 13(1), 1–12.
- Pilgrimienė, Ž., Žukauskaitė, A., Korzilius, H., Banytė, J., & Dovalienė, A. (2020). Internal And External Determinants Of Consumer Engagement In Sustainable Consumption. *Sustainability*, 12(4), 1349.
- Polloni-Silva, E., Ferraz, D., Camioto, F. De C., Rebelatto, D. A. D. N., & Moralles, H. F. (2021). Environmental Kuznets Curve And The Pollution-Halo/Haven Hypotheses: An Investigation In Brazilian Municipalities. *Sustainability (Switzerland)*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/Su13084114>

- Salsabila, F., & Azhar, Z. (2023). Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan Di Indonesia. *ARZUSIN*, 3(4), 465–480. <https://doi.org/10.58578/Arzusin.V3i4.1225>
- Saputra, F. F., & Setyowati, E. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Gandum Indonesia Dari Australia Tahun 1997-2022. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 9(1), 1–11.
- Shila Herbigovina, & Eni Setyowati. (2023). Competitiveness And Influence Of Indonesia's Coal Exports On International Trade: Case Study Of 5 Destination Countries. *Proceedings Of The International Conference On Economics And Business Studies (ICOEBS-22-2)*, 97(1), 76–85.
- Sri Hartati, Y. (2022). Analisis Ketimpangan Ekonomi Di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 19–29. <https://doi.org/10.55049/Jeb.V14i2.116>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D. *Alfabeta*.
- Sumaryoto, N., A., & T, A. (2021). The Impact Of Money Supply And The Inflation Rate On Indonesia Composite Index: Case Study In Indonesia Stock Exchange 2008-2017. *International Journal Of Economics*